# **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA**

 Didalam bab ini akan diawali terlebih dahulu dengan pembahasan landasan teoritis, dimana akan berisi teori-teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Kedua, adalah penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari buku teks, dan jurnal-jurnal.

 Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis menjelaskan kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan di teliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu berupa skema, uraian singkat dan didalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan di dalam penelitian.

## **Landasan Teoritis**

### **Teori Agensi ( *Agency Theory* )**

Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi adalah :

“*Agency relationship is a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their other behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”

Pada teori agensi, terdapat hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent* untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. (Eisenhardt, 1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk adverse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan atau diberikan oleh orang lain masih dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya. Di dalam sebuah perusahaan, hubungan agensi ini ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dan *agent*. *Agent* memiliki tujuan untuk mendapatkan bonus atau insentif sebesar-besarnya atas hasil kerja yang dicapainya. Sementara *principal* ingin meningkatkan tingkat kesejahteraannya dengan cara memperoleh pengembalian yang tinggi atas investasinya

Teori keagenan ini dapat menimbulkan masalah didalam praktiknya. Menurut Juliantari & Rasmini (2013) masalah yang dapat terjadi dalam hubungan agensi adalah adanya asimetri informasi, dimana agen lebih banyak memiliki informasi apabila dibandingkan dengan *principal*. Konflik tersebut dapat timbul karena terdapat perbedaan kepentingan yang berbeda dari pihak *agent* dan *principal* dalam perusahaan. Dengan adanya masalah asimetri informasi akan menyulitkan pihak *principal* untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap tindakan *agent*.

Untuk mengurangi masalah keagenan ini, maka muncul apa yang disebut sebagai biaya keagenan. Biaya tersebut terdiri dari *monitoring cost, bonding cost, dan residual cost* (Jensen dan Meckling, 1976). *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal.*

### **Audit**

#### Definisi *Auditing*

*Auditing* menurut Arens et al., ( 2017 : 4 )adalah :

“*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.*

“*Auditing* adalah suatu akumulasi dan evaluasi dari bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang sudah ditetapkan. *Auditing* seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Sedangkan *auditing* menurut Messier et al., (2017 : 12) adalah :

“Proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyekif mengenai asersi-asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan dan mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

 Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *auditing* adalah suatu proses akumulasi dan evaluasi bukti yang obyektif serta sistematis untuk mendapatkan bukti yang didapat dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya, dimana proses ini harus dilakukan oleh orang yang independen dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

#### ­Jenis- Jenis *Auditing*

Terdapat tiga jenis utama audit menurut Arens *et al.* (2017:12-13) yaitu :

##### Audit Operasional

Audit operasional (*operational audit*) mengevaluasi dari efisiensi dan efektivitas dari suatu metode dan prosedur operasi dari suatu organisasi. Pada saat pengerjaan dari audit operasional, manajemen pastinya mengharapkan adanya rekomendasi untuk meningkatkan kegiatan operasi. Dalam audit operasional, *review* tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat berupa evaluasi dari struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan bagian lain yang mana memenuhi syarat auditor. Karena banyak area yang berbeda di mana efektivitas operasional dapat dievaluasi, tidak mungkin untuk mengkarakterisasi pelaksanaan audit operasional yang khusus. Audit ini kadang-kadang disebut juga audit kinerja (*performance audit*) atau audit manajemen (*manajemen audit*). Audit operasional memberikan tantangan yang berbeda dari audit laporan keuangan atau audit kepatuhan karena audit operasional sering mensyaratkan auditor untuk mengidentifikasi atau menciptakan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi.

##### Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan (*compliance audit*) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.

##### Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan (*financial statement audit*) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang biasanya adalah standar akuntansi internasional. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

#### Pengertian Auditor

Ada beberapa macam tipe auditor di Indonesia. Menurut Arens *et al.* (2017:14-15), auditor terbagi kedalam empat macam, yaitu :

##### Auditor Eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP bertanggunng jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, perusahaan besar lainnya , dan banyak perusahaan kecil serta organisasi *non-profit*. Sebutan KAP mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. KAP sering disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

##### Auditor Pemerintah

###### Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah. Tujuan audit BPKP adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Auditor BPKP juga sangat dihargai dalam profesi audit.

###### Auditor Eksternal Pemerintah

Auditor eksternal pemerintah atau sering disebut auditor badan pemeriksa keuangan (BPK) adalah auditor yang bekerja untuk BPK Republik Indonesia badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanggung jawab utama BPK adalah untuk melaksanakan fungsi audit DPR, dan juga mempunyai banyak tanggung jawab audit seperti KAP. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR.

##### Auditor Pajak

Auditor pajak adalah auditor yang melaksanakan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak apakah SPT sudah mematuhi ketentuan ketentuan pajak yang berlaku, dan audit ini bersifat audit kepatuhan (*compliance audit)*. Masalah-masalah perpajakan dapat meliputi pajak penghasilan pribadi, pajak hadiah, pajak bumi dan bangunan, pajak korporasi perwalian, dan sebagainya. Dikarenakan pajak itu rumit, seorang auditor yang terlibat didalam bidang ini harus memiliki pengetahuan tentang pajak dan keahlian audit yang tinggi untuk dapat melakukan audit yang efektif.

##### Auditor Internal

 Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan individu, kemitraan, instansi pemerintah, dan entitas lainnya. Dalam perusahaan besar, staf audit internal memiliki jumlah yang cukup banyak. Tanggung jawab auditor internal bermacam-macam, tergantung pada pemberi kerja. Di banyak negara, pengalaman audit internal dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pengalaman untuk menjadi CPA. Banyak auditor internal mengejar sertifikasi sebagai auditor internal bersertifikat (CIA), dan beberapa auditor internal mengejar gelar CPA dan CIA.

### ***Auditor Switching***

*Auditor Switching* merupakan perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pergantian auditor ini dilakukan untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang handal bagi perusahaan dan mempertahankan tingkat independensi auditor. Pergantian auditor ini dapat terjadi karena adanya regulasi dari pemerintah yang membatasi pemberian jasa audit yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dimana pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, sehingga perusahaan memiliki beberapa alasan dan pertimbangan untuk dapat melakukan rotasi auditor. Pada tahun 2015, dikeluarkan peraturan mengenai rotasi auditor yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Pada bab 5 tentang pembatasan jasa audit, terdapat peraturan di pasal 11 ayat 1 mengenai pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun berturut-turut. Lalu pada tahun 2017 dikeluarkan sebuah peraturan baru terkait *auditor switching* untuk kegiatan jasa keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan tersebut membatasi kegiatan audit untuk kegiatan keuangan yaitu maksimal 3 (tiga) tahun buku dan untuk KAP tidak dibatasi.

Pergantian KAP dapat dilakukan secara *mandatory* yang artinya perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor setiap tiga tahun, dan *voluntary* yang artinya perusahaan melakukan pergantian auditor yang disebabkan atas permintaan klien. Jika suatu pergantian auditor terjadi karena pelaksanaan regulasi, terkait dengan pembatasan jasa audit, maka pergantian tersebut diistilahkan dengan *mandatory auditor switching*. Jika suatu pergantian auditor dilakukan bukan karena masa pemberian jasa audit telah berakhir sesuai dengan masa berlaku yang telah ditetapkan, maka hal tersebut di istilahkan sebagai *voluntary auditor switching.*

### **Opini Audit**

Perusahaan memerlukan jasa auditor independen untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangannya. Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor ini menghasilkan sebuah opini audit yang nanti digunakan oleh para pemegang saham dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Perusahaan yang telah diaudit laporan keuangannya menginginkan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified*) terhadap laporan keuangannya. Ketika perusahaan mendapat opini wajar selain wajar tanpa pengecualian, perusahaan cenderung melakukan *auditor switching* untuk mendapatkan opini audit yang diinginkan perusahaan karena opini audit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak eksternal, seperti investor yang enggan membeli saham di perusahaan yang mendapat opini audit *qualified,* atau *adverse* bahkan *disclaimer.*

Menurut Arens et al., (2017 : 382) opini audit terdiri dari 5 jenis yaitu :

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualifed Opinion)*

Pendapat ini dikeluarkan auditor jika tidak adanya pembatasan terhadap auditor dalam lingkup audit dan tidak ada pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran, tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, serta penerapan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan disertai dengan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Laporan standar audit tanpa pengecualian sering disebut juga opini bersih karena tidak ada kondisi yang mensyaratkan kualifikasi atau modifikasi dalam opini auditor. Laporan standar audit ini juga merupakan opini audit yang paling umum, yang paling diharapkan dan dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien maupun oleh pihak-pihak berkepentingan lainnya. Kondisi laporan standar audit tanpa pengecualian saat diterbitkan adalah harus dipenuhi dengan syarat :

1. Seluruh laporan-neraca, laporan laba/rugi, laporan saldo laba, dan laporan aliran kas dimasukkan dalam laporan keuangan.
2. Tiga standar umum diikuti dalam seluruh penugasan
3. Bukti yang tepat dan memadai telah diakumulasi dan auditor melakukan penugasan sesuai dengan cara yang membuat ia dapat memastikan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan sudah dipenuhi
4. Laporan keuangan dinyatakan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia. Hal ini juga berarti pengungkapan yang dimasukkan ke dalam penjelasan tambahan dan bagian lain dalam laporan keuangan yang sudah memadai
5. Tidak ada keadaan yang memerlukan paragraf penjelesan tambahan atau modifikasi dalam laporan

Pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan jika semua laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan) telah lengkap diberikan dan tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Dengan menggunakan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan klien disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi.

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas *(Unqualified Opinion with Explanatory Paragraph)*

Suatu paragraf penjelas dalam laporan audit diberikan oleh auditor dalam keadaan tertentu yang mungkin mengharuskannya melakukan hal tersebut, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu kalimat penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

1. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
3. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan .
4. Penekanan atas suatu hal.
5. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
6. Pendapat wajar sebagian didasarkan pada laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas diberikan ketika auditor merasa perlu memberikan informasi tambahan mengenai laporan keuangan yang disajikan klien. Meskipun suatu proses audit telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan serta laporan keuangan telah disajikan secara wajar, jika auditor merasa perlu untuk memberikan informasi tambahan, maka dikeluarkanlah pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas.

1. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Laporan opini audit yang menyatakan pendapat wajar dengan pengeculian adalah laporan yang dapat dihasilkan dari pembatasan ruang lingkup auditor atau tidak diterapkannya prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan ini dapat digunakan hanya saat auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan dinyatakan dengan wajar. Pengecualian ruang lingkup atau opini dapat diterbitkan hanya jika auditor tidak dapat mengakumulasi seluruh bukti yang disyaratkan dalam standar akuntansi yang beralaku umum. Oleh karena itu, jenis pengecualian ini digunakan ketika ruang lingkup auditor dibatasi oleh klien atau jika muncul kondisi yang menyebabkan auditor tidak dapat melakukan audit secara lengkap. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan seorang auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian, yaitu :

1. Klien membatasi ruang lingkup audit
2. Kondisi-kondisi yang ada di luar kekuasaan klien ataupun auditor menyebabkan auditor tidak dapat melakasanakan prosedur audit
3. Laporan keuangan tidak disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan
4. Ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi keuangan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan

Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau terjadi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum pada saat penyiapan laporan keuangan. Dengan adanya kondisi-kondisi tersebut, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified*).

1. Pendapat Tidak Wajar *(Adverse Opinion)*

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan klien. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan tidak disusun berdasar standar akuntansi keuangan yaitu GAAP. Selain itu, pendapat tidak wajar disebabkan karena ruang lingkup auditor dibatasi sehingga bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya tidak dapat dikumpulkan. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor maka informasi yang disajikan klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, setelah dilakukan investigasi memadai dan ketidaksesuiannya dengan GAAP, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

1. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat *(Disclaimer of Opinion)*

Jika auditor tidak memberikan pendapat atas obyek audit, maka laporan ini disebut laporan tanpa pendapat (*disclaimer)*. Hal ini disebabkan beberapa kondisi, yaitu adanya pembatasan yang sifatnya luar biasa terhadap lingkungan auditnya, kemudian karena auditor dan manajemen tidak mencapai kata sepakat dalam aspek kinerja, maka kondisi ini dapat menyebabkan auditor untuk memberikan opini *disclaimer.*

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar adalah pendapat tidak wajar ini diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran dalam keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat *(disclaimer)* karena ia tidak cukup memperoleh bukti atau kurang memiliki pengetahuan mengenai kewajaran laporan keuanga auditan atau karena adanya ketidaktercapaian kata sepakat dengan klien.

### **Kualitas Audit**

Kualitas audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit menurut standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran jalannya tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar audit. Standar audit meliputi mutu professional, auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.

Menurut Wooten (2003), istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi orang yang berbeda. Bagi para pengguna laporan keuangan, kualitas audit memberikan jaminan yang absolut bahwa tidak ada kecurangan dan salah saji yang material didalam laporan perusahaan. Sedangkan bagi auditor, kualitas audit adalah mengikuti standar audit yang ketat dan juga harus menilai resiko bisnis dengan tujuan untuk menghindari tuntutan hukum, harus meminimalisasi ketidakpuasan klien, dan menjaga reputasi auditor.

Karena kualitas audit tidak dapat diobservasi, para peneliti mencari indikator-indikator untuk mengukur kualitas audit. Peneliti yang meneliti tentang kualitas audit pada umumnya menggunakan ukuran KAP sebagai indikator dari kualitas audit. De Angelo (1981) menteorikan bahwa KAP berskala besar dianggap memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena KAP berskala besar memiliki auditor-auditor yang berkualitas tinggi, reputasi yang tinggi dan sudah dipercaya oleh kliennya. Mereka juga memiliki sumber daya yang banyak sehingga mampu untuk mempekerjakan dan melatih karyawan-karyawannya terbaiknya dan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Dwiyanti & Sabeni (2014), ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan dan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin besar total aset sebuah perusahaan mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan klien tersebut adalah skala besar, begitu juga sebaliknya. Pada umumnya, baik ukuran perusahaan yang tergolong kecil atau ukuran perusahaan yang tergolong besar sama-sama akan melakukan pergantian auditor. Ukuran perusahaan yang besar pada umumnya melakukan *auditor switching* karena perusahaan yang besar memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan *auditor switching,* tingkat kompleksitas yang tinggi dan memiliki keinginan untuk mempertahankan reputasi perusahaan dalam mengeluarkan laporan keuangan yang kredibel (Pratitis, 2012). Sedangkan ukuran perusahaan yang tergolong kecil cenderung tidak melakukan *auditor switching* karena perusahaan kecil tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan *auditor switching* secara voluntary.

## **Penelitian Terdahulu**

Tabel 2.1
Ikhtisar Penelitian Ni Wayan Ari Juliantari & Ni Ketut Rasmini

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Ni Wayan Ari Juliantari & Ni Ketut Rasmini (2013) |
| Judul | *Auditor Switching* dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.  |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien. |
| Kesimpulan | * Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Pergantian Manajemen tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching.*
* Ukuran Perusahaan Klien tidak berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.
 |

Tabel 2.2
Ikhtisar Penelitian R. Meike Erika Dwiyanti dan Arifin Sabeni

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | R. Meike Erika Dwiyanti dan Arifin Sabeni (2014) |
| Judul | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Secara *Voluntary*. |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Pergantian Manajemen, Opini Wajar dengan Pengecualian, Ukuran Perusahaan Klien, Kualitas Audit, *Financial Distress*, Fee Audit |
| Kesimpulan | * Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Pergantian Manajemen tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching.*
* Ukuran Perusahaan Klien tidak berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching.*
 |

Tabel 2.3
Ikhtisar Penelitian Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Yuka Faradila dan M. Rizal Yahya (2016) |
| Judul | Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap *Auditor Switching*. |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Opini Audit, *Financial Distress*, Pertumbuhan Perusahaan |
| Kesimpulan | * Opini Audit berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching.*
* *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching.*
* Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif *terhadap Auditor Switching.*
 |

Tabel 2.4
Ikhtisar Penelitian Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Alexandros Ngala Solo Wea dan Dewi Murdiawati (2015) |
| Judul | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching* Secara *Voluntary*. |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Ukuran KAP, Presentase Perubahan ROA, Ukuran Perusahaan, Opini Audit |
| Kesimpulan | * Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Presentase Perubahan ROA tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
 |

Tabel 2.5
Ikhtisar Penelitian I Gusti Bagus Bayu Pratama Putra dan I Ketut Suryanawa

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | I Gusti Bagus Bayu Pratama Putra dan I Ketut Suryanawa (2016) |
| Judul | Pengaruh Opini Audit dan Reputasi KAP Terhadap *Auditor Switching*. |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Opini Audit, Reputasi KAP |
| Kesimpulan | * Opini Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
 |

Tabel 2.6
Ikhtisar Penelitian Binti Luthfiyati

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Binti Luthfiyati (2016) |
| Judul | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan *Audit Tenure* Terhadap *Auditor Switching* |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, *Audit Tenure* |
| Kesimpulan | * Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Opini Audit memilki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Pergantian manajemen memilki pengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.
* Ukuran KAP memilki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Audit Tenure memilki pengaruh positif yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
 |

Tabel 2.7
Ikhtisar Penelitian Aminah dan Alfiani Werdhaningtyas

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Aminah dan Alfiani Werdhaningtyas (2017) |
| Judul | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahan Melakukan *Auditor Switching*. |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan Klien |
| Kesimpulan | * Opini Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Pergantian Manajemen berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.
* Ukuran Perusahaan Klien tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
 |

Tabel 2.8
Ikhtisar Penelitian Jessica Stephanie dan Tri Wahyu Jatmiko Prabowo

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Jessica Stephanie dan Tri Wahyu Jatmiko Prabowo (2017) |
| Judul | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching* di Indonesia |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Ukuran Perusahaan Klien, Pergantian Manajemen, Kualitas Audit, Opini Audit, *Financial Distress*, Fee Audit |
| Kesimpulan | * Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh secara negatif terhadap *Auditor Switching*
* Pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Opini audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
* Fee audit tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*
 |

Tabel 2.9
Ikhtisar Penelitian Nanik Niandari

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Nanik Niandari (2017) |
| Judul | *Voluntary* *Audit Switching* : Perspektif Peraturan Menteri Keuangan No.17 / PMK.01/2008  |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Opini Audit, Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Pertumbuhan Perusahaan, Ukuran Perusahaan |
| Kesimpulan | * Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Pergantian Manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Pertumbuhan Perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*
* Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Auditor Switching*.
 |

Tabel 2.10
Ikhtisar Penelitian Novia Retno Astrini dan Dul Muid

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Peneliti | Novia Retno Astrini dan Dul Muid (2013) |
| Judul | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Manufaktur di Indonesia Melakukan *Auditor Switching* |
| Variabel Dependen | *Auditor Switching* |
| Variabel Independen | Reputasi KAP, Pergantian Manajemen, *Financial Distress*, Opini Audit, Audit Tenure |
| Kesimpulan | * Reputasi KAP tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Pergantian Manajemen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Opini Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
* Audit Tenure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Auditor Switching*.
 |

## **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *Auditor Switching* yaitu Opini Audit, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan. *Auditor Switching* merupakan pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien secara wajib atau sukarela. Pergantian auditor dapat terjadi karena faktor dari sisi klien ataupun dari sisi auditor. Adapun keterkaitan antar variabel dengan *Auditor Switching* dijelaskan sebagai berikut.

1. **Pengaruh Opini Audit terhadap *Auditor Switching***

Hampir setiap perusahaan ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian yang berasal dari auditor yang melakukan prosedur audit atas laporan keuangan perusahaan mereka. Setelah mengaudit laporan keuangan klien, auditor akan memberikan opini mereka atas laporan keuangan tersebut. Saat perusahaan mendapatkan opini selain *unqualified* maka akan muncul ketidakpuasan dan cenderung akan melakukan *auditor switching* (Faradila & Yahya, 2016). Hal tersebut dikarenakan opini audit memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna eksternal laporan keuangan dan juga berguna untuk keputusan investasi. Pada teori agensi dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*. *Agent* harus mempertanggungjawabkan laporan perusahaan kepada *principal*. Ketika perusahaan mendapatkan opini selain *unqualified*, dimana opini tersebut bukan yang diinginkan perusahaan maka perusahaan akan mengganti auditornya agar opini yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan perusahaan.

1. **Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Auditor Switching*.**

Penelitian yang meneliti tentang kualitas audit biasanya dikaitkan dengan ukuran KAP (*Big Four* dan *Non Big Four)*. KAP *Big Four* memiliki reputasi yang tinggi di lingkungan bisnis dan mampu menyediakan jasa audit berkualitas tinggi. Wooten (2003) mengatakan kualitas audit yang dihasilkan akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan suatu entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Chadegani *et* al. (2011) juga menyatakan bahwa apabila kualitas audit yang dihasilkan kurang berkualitas maka perusahaan cenderung akan melakukan *auditor switching* karena hal tersebut menurunkan tingkat kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Maka perusahaan cenderung menggunakan jasa akuntan publik dari kantor akuntan publik ternama karena selain karena reputasi yang tinggi, perusahaan juga menginginkan tingkat kredibilitas laporan keuangannya meningkat.

1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching.***

Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan apabila dilihat berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut Dwiyanti & Sabeni (2014). Perusahaan yang besar memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta memiliki anak perusahaan dan segmen usaha yang bermacam-macam. Maka, perusahaan membutuhkan auditor yang handal dibidangnya dan mengerti seluk beluk pekerjaannya serta apa yang harus dilakukan. Karena hal itulah, menurut Pratitis (2012) ukuran perusahaan yang tergolong besar cenderung melakukan *auditor switching* karena perusahaan yang tergolong besar memiliki kemampuan finansial yang tinggi untuk mengganti auditornya atau melakukan *auditor switching* dengan yang baru apabila hasil nya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan berskala kecil cenderung tidak melakukan *auditor switching* karena perusahaan skala kecil memiliki keterbatasan finansial untuk melakukan *auditor switching* sehingga perusahaan akan cenderung mempertahankan akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2 1
Kerangka Pemikiran

Opini Audit

Ukuran Perusahaan

Kualitas Audit

*Auditor Switching*

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

Ha1 : Opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ha2 : Kualitas audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ha3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*.